

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN PEMOTONGAN
HEWAN TERNAK BETINA PRODUKTIF
DI KABUPATEN LEBAK BANTEN**

Disusun Oleh:

NAMA : BRITA ARIYANINGSIH
NPM : 2142021041
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMBANGUNAN
DAERAH

Tesis diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama	:	Brita Ariyaningsih
NPM	:	2142021041
Jurusan	:	Administrasi Publik
Program Studi	:	Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi	:	Manajemen Pembangunan Daerah
Judul Tesis (Bahasa Indonesia)	:	Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Lebak Banten
Judul Tesis (Bahasa Inggris)	:	<i>Implementation of the Policy Prohibiting the Slaughter of Productive Female Livestock in Lebak Regency Banten</i>

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A.

Pembimbing II



Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brita Ariyaningsih
NPM : 2142021041
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Pembangunan Daerah

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya susun merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari hasil penelitian tesis ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, November 2024



3000
RUPIAH
METERAI
TEMPEL
8E8DFALX220696312

Brita Ariyaningsih

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **"Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten"** ini dengan baik. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada tingkat jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Penulisan tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos., M.A. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dan pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berharga.
2. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A., selaku Wakil Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Ibu Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing II.
4. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Achmad Shoheh dan Ibu Hj. Siti Aminah yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan.
5. Bapak Rahmat Yuniar, ST., M.Si selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak. yang telah memberikan dukungan moril bagi penulis dalam penulisan tesis ini.
6. Suami tercinta Ir. H. Sultoni dan anak-anak tersayang (Ghina, Salsabila, Salma Salwaa dan Kamila) yang selalu memberikan dukungan moral dan material serta doa yang tiada henti.
7. Sdr. Andika Suparjan, S.E., M.M. yang telah memberikan tambahan referensi dalam penulisan tesis ini.
8. Para narasumber penelitian penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, dengan data dan informasi lengkap dari Bapak/Ibu maka penyusunan tesis ini menjadi kaya informasi, telaahan dan analisis dan telah memberikan sumbangsih atas penelitian tesis penulis.
9. Seluruh pegawai Bagian AAK yang telah membantu kelancaran studi penulis selama di Politeknik STIA LAN Jakarta.

10. Seluruh rekan magister terapan angkatan tahun 2021 terutama rekan-rekan Manajemen Pembangunan Daerah dan Annysa Subagyo yang sangat *mensupport* penulis dalam penyusunan tesis ini.
11. Seluruh rekan kerja di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta motivasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang yang dibahas. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua.

Jakarta, November 2024

Penulis

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten

Brita Ariyaningsih
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 4 mengenai pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif di Kabupaten Lebak, Banten. Pendekatan ini mengambil inspirasi dari gagasan Van Meter dan Van Horn terkait pengimplementasian kebijakan. Penelitian ini mengadopsi metode gabungan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan publik, yang didefinisikan sebagai serangkaian tindakan oleh entitas publik untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam kebijakan sebelumnya. Dalam pendekatan metode kuantitatif, sampel diambil dari populasi sebanyak 125 orang yang terdiri dari manajer, peternak, dan pedagang daging yang berhubungan dengan UPTD RPH. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling dengan menggunakan rumus proporsi binomunal, yang menghasilkan 51 responden sebagai sampel penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan kunci dipilih secara sengaja, yaitu individu yang sangat paham tentang kebijakan, seperti pejabat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, peternak, atau pedagang daging. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara antara 10 April 2023 hingga 13 Juli 2023. Wawancara ini membahas hambatan dan strategi dalam sosialisasi kebijakan kepada masyarakat pengguna RPH. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya berkualitas, karakteristik agen pelaksana yang bertanggung jawab, dan komunikasi yang baik antarorganisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, peran serta masyarakat, terutama peternak, pedagang, dan pengguna RPH, menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan penuh, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui aturan yang jelas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan. Penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang mendukung meliputi kejelasan kebijakan, dukungan otoritas terkait, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Faktor-faktor ini membantu pelaksanaan kebijakan melalui pengawasan yang baik, penegakan hukum, serta pendidikan bagi petugas dan masyarakat. Namun, terdapat berbagai faktor penghambat, seperti rendahnya motivasi ekonomi peternak, keterbatasan sumber daya teknis, dan kurangnya sosialisasi kebijakan. Strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan ini termasuk memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, memperluas sosialisasi kebijakan, serta menyediakan solusi finansial bagi peternak. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya menjaga keberlanjutan populasi ternak betina produktif serta mengoptimalkan implementasi kebijakan.

Kata Kunci: kebijakan, pelarangan pemotongan, hewan ternak produktif, RPH

ABSTRACT

Implementation of the Policy Prohibiting the Slaughter of Productive Female Livestock in Lebak Regency Banten

Brita Ariyaningsih
Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to analyze the factors influencing the implementation of Law Number 41 of 2014, Article 18, Paragraph 4, regarding the prohibition of slaughtering productive female livestock in Lebak Regency, Banten. This approach draws inspiration from Van Meter and Van Horn's ideas on policy implementation. The study adopts a mixed-method approach, combining quantitative and qualitative methods to analyze public policy implementation, which is defined as a series of actions by public entities to achieve goals outlined in prior policy. In the quantitative approach, the sample was drawn from a population of 125 individuals, including managers, farmers, and meat traders associated with UPTD RPH. A simple random sampling method, using a binomial proportion formula, yielded 51 respondents as the research sample. In the qualitative approach, key informants were purposively selected, consisting of individuals highly knowledgeable about the policy, such as officials from the Livestock and Animal Health Service, farmers, and meat traders. Qualitative data was obtained through interviews conducted between April 10, 2023, and July 13, 2023, covering the obstacles and strategies in policy dissemination to RPH users. Data analysis results indicate that the clarity of policy measures and objectives, availability of quality resources, responsible characteristics of implementing agents, and effective inter-organizational communication positively and significantly impact policy implementation. Moreover, community involvement, particularly from farmers, traders, and RPH users, is crucial in supporting the sustainability of policy implementation. Achieving complete success requires synergy between the government and the community through clear regulations, enhancement of human resources, and ongoing policy coordination and evaluation. This study also identified supporting factors, including policy clarity, support from relevant authorities, and adequate resource availability. These factors aid policy implementation through effective supervision, law enforcement, and education for officials and the public. However, there are several obstacles, such as low economic motivation among farmers, limited technical resources, and insufficient policy socialization. Strategies to overcome these obstacles include strengthening regulations, improving human resource quality through training, expanding policy socialization, and providing financial solutions for farmers. The study underscores the importance of collaboration between the government and the community to sustain the productive female livestock population and optimize policy implementation.

Keywords: policy, prohibition of slaughtering, productive livestock, slaughterhouse (RPH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	25
1. Tinjauan Kebijakan.....	25
2. Tinjauan Teoritis.....	43
3. Teori Strategi	59
C. Kerangka Berpikir.....	62
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	64
A. Metode Penelitian	64
B. Teknik Pengumpulan Data.....	66
C. Lokus Penelitian dan Alasan Pemilihan Lokus	69
D. Responden, <i>Key Informant</i> dan Alasan Pemilihan	70
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	73
F. Instrumen Penelitian	84
BAB IV HASIL PENELITIAN	89
A. Deskripsi Objek Penelitian	89
1. Organisasi	89
2. Sumber Daya Manusia.....	92
B. Hasil Penelitian	97

C. Faktor Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 4 terhadap Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak, Banten.....	124
D. Strategi Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Produktif di Kabupaten Lebak Banten Agar Dapat Berjalan dengan Baik dan Optimal	164
BAB V PENUTUP	171
A. Kesimpulan	171
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	174



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Lebak Banten	8
Tabel 1.2 Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia di Kabupaten Lebak Banten...	9
Tabel 1.3 Jumlah Sasaran Populasi Berdasarkan Jenis Ternak di Kabupaten Lebak.....	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	67
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	69
Tabel 3.3 Skala Likert.....	73
Tabel 3.4 Interval	74
Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Implementasi Kebijakan.....	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif	75
Tabel 3.7 Tabel Ringkasan Hasil Pengujian Validitas.....	76
Tabel 3.8 Hasil Pengujian Normalitas Data dengan Kolmogorv-Smirnov.....	80
Tabel 3.9 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	81
Tabel 3.10 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas	82
Tabel 3.11 Skala Interval Likert USG	87
Tabel 4.1 Komposisi SDM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak Tahun 2023	93
Tabel 4.2 Analisa Perbandingan	120
Tabel 4.3 Uji t Parsial pengaruh variabel ukuran dan tujuan kebijakan (X ₁) terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan betina produktif (Y).....	126
Tabel 4.4 Hasil Uji F simultan pengaruh variabel independent (X) terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan betina produktif (Y)....	128
Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²)	129
Tabel 4.6 Dimensi Variabel Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	130

Tabel 4.7 Uji t Parsial pengaruh variabel sumber daya manusia dan sumber daya non manusia (X_2) terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y)	135
Tabel 4.8 Dimensi Variabel Sumber Daya Manusia & Sumber Daya Non Manusia	136
Tabel 4.9 Hasil Uji t Parsial variabel struktur birokrasi terhadap variabel implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y)	141
Tabel 4.10 Dimensi Variabel Struktur Birokrasi	142
Tabel 4.11 Hasil Uji T Parsial variabel respon, kognisi, intensitas disposisi (X_4) terhadap variabel implementasi pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif (Y)	146
Tabel 4.12 Dimensi variabel respon, kognisi, intensitas disposisi	148
Tabel 4.13 Hasil uji T Parsial variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif	152
Tabel 4.14 Dimensi variabel komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana	154
Tabel 4.15 Hasil uji T Parsial variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik terhadap implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif	158
Tabel 4.16 Dimensi variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik	159
Tabel 4.17 Alternatif Strategi	164
Tabel 4.18 Matriks USG	166
Tabel 4.19 Langkah Konkret	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan Definisi Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli	43
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	63
Gambar 3.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram dan Normal P-P Plot.....	79
Gambar 3.2 Tahapan Analisis Data	83
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak	92
Gambar 4.2 Komposisi SDM Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak Tahun 2023	94
Gambar 4.3 Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak Berdasarkan Status.....	95
Gambar 4.4 Jumlah Pegawai Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak Berdasarkan Golongannya	96
Gambar 4.5 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan	97
Gambar 4.6 Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja	98
Gambar 4.7 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	99
Gambar 4.8 Profil Responden Berdasarkan Usia	100
Gambar 4.9 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir	101
Gambar 4.10 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 1.....	102
Gambar 4.11 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 2.....	103
Gambar 4.12 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 3.....	105
Gambar 4.13 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 4.....	106
Gambar 4.14 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 5.....	108
Gambar 4.15 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 6.....	109
Gambar 4.16 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 7.....	111
Gambar 4.17 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 8.....	112
Gambar 4.18 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 9.....	114
Gambar 4.19 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 10.....	115
Gambar 4.20 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 11.....	117

Gambar 4.21	Tanggapan Responden terhadap Pernyataan 12.....	118
-------------	---	-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang signifikan telah menyentuh sektor peternakan, khususnya pada hewan ternak ruminansia, dengan tujuan memenuhi peningkatan permintaan terhadap daging dan bibit berkualitas tinggi. Teknologi ini digunakan dalam berbagai tahapan seperti pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan bobot badan hewan ternak. Dalam tahapan pengembangan, bukan hanya kawin alami yang dilakukan, tetapi juga teknik modern seperti transfer embrio, yang memungkinkan lahirnya ternak dengan karakteristik seragam baik dari segi jenis kelamin maupun bentuk tubuh. Teknik ini, bersama dengan penggunaan pakan yang efisien, mendukung produksi bibit ternak unggul untuk pertumbuhan optimal. Selain itu, inseminasi buatan juga digunakan, dimana sperma dari pejantan unggul yang telah disiapkan dalam straw beku diinjeksikan ke dalam betina. Ini berkontribusi pada penciptaan generasi hewan ternak unggul yang belum pernah tercapai sebelumnya (Teknokrat, 2024).

Kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam industri peternakan ruminansia digunakan pula pada penanganan dan pengelolaan lingkungan peternakan. Di beberapa negara seperti Australia, Amerika, hingga Denmark, teknologi berupa robot yang menyerupai mobil dimanfaatkan guna memberikan pakan dan membersihkan lingkungan. Hal tersebut dilaksanakan guna menunjang efisiensi kerja peternak karena dapat membantu peternak dalam pekerjaannya sehingga dapat fokus untuk mengembangkan mutu peternakan dan mutu produk. Penggunaan teknologi disektor peternakan dimanfaatkan pula oleh peternak di luar negeri dalam proses penyembelihan hewan, mulai dari ketika hewan dipotong, dikuliti, dan dagingnya dipisahkan dari tulang yang kesemuanya dilakukan oleh mesin. Dengan memanfaatkan

teknologi ini, dapat mempercepat kinerja para pekerja rumah potong hewan secara efisien dan higienis, (Faza, 2022)

Dalam konteks pengelolaan peternakan, peran *Administrative Services Organizations* (ASO) juga menjadi sangat penting. ASO dapat memberikan dukungan administratif dan logistik kepada peternak dengan menyediakan peralatan, teknologi, dan manajemen yang diperlukan untuk efisiensi operasional. ASO berfungsi sebagai fasilitator yang membantu peternak dalam mengelola dokumentasi, perizinan, serta pelaporan, yang memungkinkan peternak untuk fokus pada pengembangan mutu ternak dan efisiensi produksi. Dengan adanya ASO, peternak dapat memperoleh akses ke teknologi terbaru dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga kualitas ternak mereka, sekaligus memastikan bahwa semua prosedur administratif dan regulasi dipatuhi dengan baik.

Teknologi tersebut digunakan secara luas sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan daging ruminansia, baik untuk keperluan rumah tangga maupun komersial. Di Amerika Serikat, konsumsi daging ruminansia per orang per tahun mencapai 101 kg, menjadikannya salah satu konsumen daging terbesar. Di sisi lain, Australia dikenal sebagai konsumen daging sapi terbanyak dengan angka konsumsi 91 kg per orang per tahun. Eropa pun tidak ketinggalan, dengan konsumsi daging sapi per orang yang berkisar 70 kg per tahun, (Sapibagus.com, 2022). Kebutuhan yang sangat tinggi inilah yang menimbulkan praktik pemotongan hewan betina produktif karena disinyalir hewan betina lebih banyak mengandung daging dan lemak serta lebih murah harganya jika dibandingkan dengan hewan jantan. Pemotongan hewan betina ini tidak jarang dilakukan pada hewan betina yang sedang bunting, akibat dari ketidaktahuan peternak ketika melakukan pemotongan. Menurut KBBI Online, hewan betina yang sedang mengandung disebut dengan istilah bunting, yang berarti memiliki keturunan di dalam rahimnya, (KBBI, 2021).

Di Denmark, praktek penyembelihan hewan ternak betina, termasuk yang sedang bunting, juga terjadi. Dari total 825 ekor sapi betina yang diantar

ke rumah pemotongan, ditemukan bahwa 187 ekor atau sekitar 23 persen darinya berada dalam keadaan bunting, (Nielsen, Sandøe, Kjølsted & Agerholm, 2019). Bagi sebagian peternak, penyembelihan ini sebenarnya dinilai tidak sesuai dengan etika, akan tetapi keadaan memaksa melakukan hal ini demi terpenuhinya permintaan terhadap daging sapi yang terus naik dari hari ke hari. Di samping itu, alasan lain dari disembeluhnya sapi betina bunting adalah agar sapi betina tersebut terhindar dari stres yang terjadi pada saat menyusui yang akan memicu tidak baiknya mutu susu sapi yang dihasilkan. Apabila praktik penyembelihan sapi betina terus dilakukan, akan tercipta dampak buruk berupa penurunan jumlah hewan betina produktif yang ada dan hal ini akan mengakibatkan kelangkaan. Dengan demikian, pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mengatur penyembelihan hewan betina bunting meski alasan yang melatarbelakangi praktik ini adalah agar hewan betina bunting tidak mengalami stres.

Pemotongan hewan betina produktif tidak hanya dilakukan di wilayah Eropa, namun terjadi juga di benua Afrika salah satunya di negara Nigeria khususnya di wilayah Ogun. Berdasarkan survei, pada tahun 2016 sumber daya pertanian nasional Nigeria menyatakan bahwa terdapat peningkatan pesat dari hewan pedaging di Nigeria, yaitu 160 juta ekor unggas, 115 juta ekor kambing dan domba, serta sekitar 19,5 juta ekor sapi. Akan tetapi, terdapat tuntutan yang harus dipenuhi oleh Nigeria yaitu peningkatan permintaan terhadap populasi hewan dan pada saat yang bersamaan permintaan daging dari sisi konsumen, disertai program pertanian berkelanjutan pada tahun 2030, peningkatan gizi, ketahanan pangan, serta penuntasan kelaparan. Dari tahun 2008 hingga 2016, di Nigeria, catatan menunjukkan bahwa setidaknya sebanyak 353.503 ekor ternak betina telah disembelih, dengan rata-rata tahunan sekitar 29.457 ekor, meningkat jauh dari angka sebelumnya yaitu 3.726 ekor per tahun. Kenaikan signifikan sebesar 12,65% ini mengindikasikan adanya praktik penyembelihan ilegal yang mempengaruhi jumlah besar hewan ternak betina yang dibunuh, (Adebawale dkk., 2020). Apabila jumlah hewan yang dipotong semakin

meningkat, ada kekhawatiran bahwa akan memicu rusaknya populasi hewan ternak unggul yang diperlukan di masa depan. Maka dari itu dibutuhkan regulasi dari pemerintah Nigeria terkait pemotongan hewan betina produktif sehingga populasinya dapat tetap terjaga dengan baik.

Praktik penyembelihan hewan betina produktif pernah dikaji oleh Okorie-Kanu *dkk* (2018). Dalam kajian berjudul "*Slaughter of pregnant goats for meat at Nsukka slaughterhouse and its economic implications: A public health concern*", terungkap bahwa selama periode tiga bulan di Nsukka, Nigeria, tercatat pemotongan 684 ekor kambing. Dari jumlah tersebut, 617 ekor adalah kambing betina, dan 364 ekor di antaranya tengah bunting.

Tingginya jumlah kambing betina bunting yang dipotong tidak hanya berpotensi membuat jumlah kambing yang ada menjadi terancam, tetapi juga menjadikan daging yang dihasilkan berkualitas buruk. Apabila dikonsumsi, daging jenis ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan gizi buruk atau malnutrisi. Tidak adanya stok kambing betina produktif dapat juga memicu turunnya kondisi perekonomian di Nigeria, hal tersebut dikarenakan ketika tidak berimbangnya ketersediaan hewan ternak dengan permintaan pasar yang begitu tinggi. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah Nigeria harus mampu mengontrol jumlah kambing betina yang dipotong dengan optimal supaya stok daging yang mampu disediakan oleh produsen dan jumlah daging yang diminta oleh pasar dapat terjaga dengan baik dan dapat diperoleh daging yang sehat dan layak konsumsi.

Tidak hanya di Afrika dan Eropa, pemotongan hewan ternak betina juga dapat ditemukan di Indonesia, yaitu di Pulau Jawa khususnya Kabupaten Lebak, Bali, Kota Ambon, wilayah Timor Barat, dan Kabupaten Aceh Besar. Tingginya praktik pemotongan hewan ternak produktif di Aceh Besar dikaji oleh Samadi *dkk* (2022). Penelitian yang berjudul "*Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah (Qanun) untuk Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Aceh Besar*" mengkaji efektivitas aturan lokal dalam mengatur pemotongan hewan ternak produktif seperti kerbau dan sapi di

Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sedikitnya 73,13% pemotongan sapi dan kerbau produktif terjadi karena permintaan daging yang tinggi di pasaran. Faktor ekonomi juga menjadi alasan utama bagi peternak untuk menjual hewan-hewan produktif tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar telah melarang pemotongan hewan betina produktif. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan melalui wawancara, dari keseluruhan peternak kerbau dan sapi yang dikaji, setidaknya 79,65% di antaranya menguraikan bahwa tidak pernah ada sosialisasi yang diberikan kepada mereka terkait dilarangnya pemotongan hewan ternak betina produktif.

Maria Krova *dkk* (2018), bahwa penelitian yang dilakukan dengan judul "Alternatif Kebijakan untuk Mengurangi Praktik Pemotongan Sapi Bali Betina Produktif di Wilayah Timor Barat" bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara mereduksi praktik pemotongan hewan betina produktif. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas sapi yang dijadikan sebagai objek pemotongan di Timor Barat adalah jenis sapi Bali, khususnya yang berjenis kelamin betina, yang berasal dari upaya pelestarian genetik. Alasan pemilihan sapi Bali betina yang produktif sebagai target pemotongan melibatkan kepentingan dari beragam pihak. Di tingkat hulu, pemilihan sapi betina untuk dipotong dilakukan supaya kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Sementara di tingkat hilir, rumah potong hewan dan beberapa pihak juga mempunyai kepentingan guna memenuhi permintaan pasar dan meraup untung yang relatif besar. Sedangkan di tingkat pedagang, memiliki tujuan guna mencukupi permintaan pasar dan menjaga rantai pasok sehingga para pelanggan akan tetap loyal dengan membeli daging kepadanya. Lebih lanjut, di tingkat pemerintah, berupaya agar pemotongan sapi betina produktif yang dilakukan dapat dikendalikan agar bibit plasma nutfah dapat dijaga kelestariannya. Penelitian yang dilaksanakan ini memperoleh hasil bahwa belum ada peranan dari lembaga yang menjadi penyedia daging sapi dalam mengendalikan praktik pemotongan dan penjualan daging sapi betina produktif. Berdasarkan hal

tersebut, pemerintah Timor Barat mengeluarkan regulasi agar pemotongan sapi betina produktif dapat lebih terkendali melalui penekanan mortalitas dan peningkatan *calf crop*.

Di Kota Ambon, pemotongan hewan ternak betina juga dilakukan dalam jumlah besar. Fenomena tersebut dikaji oleh Bennu Nur *dkk* (2019), dalam penelitian yang berjudul "Perilaku Peternak Dalam Pemotongan Sapi Betina Produktif (Penelitian Kasus RPH Kota Ambon)," diungkap bahwa data dari Dinas Pertanian dan Kehutanan menunjukkan pemotongan 3.226 ekor sapi betina produktif antara tahun 2013 sampai 2017 di Kota Ambon. Pada awal periode, yaitu tahun 2013, sebanyak 556 ekor sapi betina produktif terpaksa dipotong untuk memenuhi kebutuhan pasar. Angka ini meningkat hingga 804 ekor pada tahun 2017. Selama periode lima tahun ini, kerugian ekonomi akibat kegiatan ini diperkirakan mencapai Rp112.910 miliar, atau rata-rata Rp22,582 miliar per tahun. Mayoritas sapi betina yang dikurbankan merupakan sapi yang masih berada di usia produktif, yang dapat mengganggu proses alami seperti menyusui anak sapi. Penelitian ini merekomendasikan implementasi beberapa strategi yang mencakup aspek teknis, ekonomis, dan sosiokultural melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi kawasan distribusi, untuk mengatasi isu pemotongan sapi betina produktif ini. Untuk wilayah produsen, hewan ternak sapi dibutuhkan regulasi guna membatasi pemotongan sapi betina produktif. Sedangkan untuk wilayah yang tidak memiliki hewan ternak, dibutuhkan regulasi terkait pengadaan sapi lokal yang pengembangbiakannya dapat dilakukan secara mandiri. Agar program tersebut dapat terwujud, diperlukan sumber daya dana dan terdapatnya lembaga yang mampu mengawasi program dengan optimal.

Pemotongan ternak betina produktif juga masih terdapat di Pulau Jawa dan Bali. Data dari sensus peternakan nasional tahun 2013 memperlihatkan penurunan populasi sapi dan kerbau sebesar 15% bila dibandingkan dengan data tahun 2011. Spesifiknya, di Jawa, terjadi penurunan populasi sebesar 24-27%, dan di Bali, penurunan tersebut mencapai 25%. Faktor utama penurunan

ini adalah pemotongan tinggi terhadap sapi betina yang masih produktif. Lebih lanjut, di Jawa, berbagai faktor berkontribusi terhadap penurunan jumlah hewan betina yang produktif. Hal ini diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Priyanti, *dkk* (2018), bahwa penelitian berjudul "Mencegah Pemotongan Sapi Produktif melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah" mengungkap berbagai faktor yang mendorong peningkatan pemotongan sapi perah, di antaranya adalah harga beli sapi betina yang relatif lebih murah, keterbatasan jumlah sapi jantan, adanya kuota perdagangan antarwilayah, ketidakseragaman penegakan hukum, serta kurangnya pemahaman yang sama tentang kriteria sapi betina yang produktif di kalangan peternak. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kenaikan permintaan daging antar wilayah yang melebihi pertumbuhan populasi ternak, sehingga mengancam keberlangsungan dan ketersediaan ternak dalam negeri. Rekomendasi yang diajukan meliputi kebutuhan adanya organisasi atau badan lokal yang bertanggung jawab memilih sapi betina produktif untuk disalurkan ke rumah pemotongan hewan agar kemudian dapat digunakan sebagai induk. Langkah ini diharapkan dapat membantu daerah memiliki induk sapi yang cukup untuk kemudian dapat mendistribusikannya ke wilayah lain, mendukung upaya pemerintah dalam menjaga populasi sapi perah betina produktif untuk masa depan.

Kabupaten Lebak, Banten, sebuah wilayah di pulau Jawa, pemotongan sapi produktif juga marak terjadi. Daerah ini, yang menjadi salah satu penghasil daging untuk pasokan nasional, mengalami peningkatan besar dalam permintaan daging, baik dari dalam maupun luar daerah, termasuk pengiriman antar pulau. Dengan demand yang tinggi ini, terjadi peningkatan pemotongan ternak betina produktif yang mengundang perdebatan serta kekhawatiran mengenai keberlanjutan pasokan daging sapi di pasar.

Tabel 1.1
Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Lebak Banten

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak Ruminansia						Jumlah Total Periode tahun 2019-2021		Jumlah dalam ton	Jumlah Total Kebutuhan
		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021					Periode 2019-2021
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina		(dalam ton)
1.	Kerbau	7.957	6.168	7.798	10.944	7.998	11.052	23.753	28.164	21.039 (asumsi 1 kerbau = 0,9 ton)	5.719
2.	Sapi Potong	3.511	1.012	2.583	1.806	2.600	1.837	8.694	4.655	3.042 ton (asumsi 1 sapi = 0,35 ton)	78.252
3.	Domba	82.946		72.356		75.000		230.302		9.212 ton (asumsi 1 domba = 0,04 ton)	9.336
4.	Kambing	101.243		100.643		102.640		304.526		10.049 ton (asumsi 1 kambing = 0,033 ton)	9.790

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1, ketersediaan populasi kerbau periode tahun 2019-2021 dikisaran 21.039 ton dengan jumlah kebutuhan atau permintaan sebanyak 5.719 ton, ketersediaan populasi sapi potong periode tahun 2019-2021 dikisaran 3.042 ton dengan jumlah permintaan kebutuhan sebanyak 78.252 ton, ketersediaan populasi domba periode tahun 2019-2021 dikisaran 9.212 ton dengan jumlah permintaan kebutuhan 9.336 ton, dan untuk ketersediaan kambing periode tahun 2019-2021 dikisaran 10.049 ton dengan jumlah permintaan kebutuhan sebanyak 9.790 ton. Dari data tersebut hanya ketersediaan populasi sapi potong yang tidak dapat memenuhi kuota permintaan kebutuhan dimana ketersediaan yang ada hanya dikisaran 3.042 ton sedangkan kebutuhan akan daging sapi potong mencapai 78.252 ton. Untuk memenuhi kuota permintaan pasar, telah terjadi pemotongan hewan betina produktif tidak hanya dari sapi potong, namun dari ternak lain seperti kerbau, domba dan kambing sebagaimana yang tercantum pada tabel 1.2 mengenai jumlah pemotongan ternak periode tahun 2019-2021 di Kabupaten Lebak Banten.

Tabel 1.2
Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia di Kabupaten Lebak Banten

No	Jenis Ternak	Pemotongan Ternak Ruminansia						Jumlah Total	
		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina	Jantan	Betina
1	Kerbau	3679	596	3314	568	3358	568	10.351	1732
2	Sapi Potong	77	43	74	161	4654	178	4.805	328
3	Domba	22.456		22.057		21.418		65.931	
4	Kambing	23.375		22.710		22.661		68.476	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak Tahun 2022

Tabel 1.3
Jumlah Sasaran Populasi Berdasarkan Jenis Ternak di Kabupaten Lebak

Jenis Ternak	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Kerbau	19.62	18.639	17.707
Sapi Potong	4.511	4.691	4.879
Domba	82.946	78.799	74.859
Kambing	101.243	96.181	91.372

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 data pemotongan ternak di Kabupaten Lebak, tercatat bahwa selama periode 2019 hingga 2021, jumlah total pemotongan ternak mencapai 15.156 ekor untuk jenis jantan dan 2.160 ekor untuk jenis betina. Dengan rincian pemotongan kerbau jantan sebanyak 10.351 ekor dan betina sebanyak 1.732 ekor, sedangkan sapi jantan sebanyak 4.805 ekor dan sapi betina sebanyak 328 ekor. Pada tahun 2021, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pemotongan sapi, terutama sapi jantan yang mencapai 4.654 ekor, sedangkan sapi betina mencapai 178 ekor. Peningkatan jumlah pemotongan ternak ini diduga disebabkan oleh meningkatnya permintaan daging untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini dapat dipengaruhi oleh terbatasnya ruang gerak masyarakat selama pandemi Covid-19, yang mendorong peningkatan konsumsi di rumah atau lingkungan sekitar. Sementara itu, berdasarkan tabel 1.3 sasaran populasi ternak kerbau menunjukkan tren penurunan dari 19.620 ekor pada tahun 2019 menjadi 17.707 ekor pada tahun 2021. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh

jumlah pemotongan yang tetap tinggi setiap tahunnya, sehingga populasi kerbau tidak mampu bertumbuh sesuai dengan kapasitas regenerasi yang diperlukan. Meskipun terjadi sedikit penurunan dalam tren pemotongan kerbau, jumlahnya masih cukup signifikan sehingga turut mempengaruhi penurunan sasaran populasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemotongan kerbau perlu dikendalikan agar regenerasi populasi tetap terjaga. Sementara itu, pemotongan sapi potong meningkat secara signifikan, dengan diikuti peningkatan sasaran populasi. Hal ini menunjukkan tren yang cukup baik dalam hal pemeliharaan populasi sapi, meskipun peningkatan pemotongan pada tahun 2021 tetap perlu mendapat perhatian lebih untuk mencegah potensi penurunan populasi di masa yang akan datang. Tren pemotongan ternak lainnya, seperti domba dan kambing, menunjukkan penurunan yang sejalan dengan penurunan sasaran populasi masing-masing. Namun, penurunan ini tetap perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi keberlanjutan populasi domba dan kambing jika tidak diimbangi dengan upaya pengendalian dan peningkatan populasi.

Di tingkat nasional, tren pemotongan hewan betina produktif juga menjadi perhatian. Berdasarkan pengamatan dari Direktorat Jenderal Peternakan, pada tahun 2020 hewan ternak betina produktif yang dipotong dalam skala nasional mencapai 31,08% per tahun. Jumlah yang relatif tinggi ini tentunya berdampak buruk bagi populasi dan produksi daging lokal. Dengan tingginya angka pemotongan tersebut, maka akan terjadi pula kenaikan harga daging dan menjadikan peternak lebih cepat dalam menjual peliharaannya karena juga ingin meraup untung dari fenomena tersebut. Apabila hal ini terus berlanjut, terdapat kekhawatiran bahwa populasi kerbau dan sapi akan menurun. Penurunan tersebut dipicu oleh menurunnya jumlah hewan ternak betina produktif yang semestinya dapat menambah jumlah populasi hewan ternak. Lebih lanjut, bukan tidak mungkin bahwa fenomena ini akan mengancam kelestarian hewan dan memicu kepunahan hewan terkait.

Dari perspektif administrasi pembangunan negara, kebijakan pelarangan pemotongan ternak betina produktif harus dilihat sebagai bagian dari upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa populasi ternak betina produktif yang mampu mereproduksi tetap terjaga, guna mendukung kebutuhan pasokan daging di masa depan serta mempertahankan kualitas genetik ternak.

Terdapat gap kebijakan, yakni banyak kebijakan yang sudah ada tidak diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Misalnya, meskipun ada peraturan yang melarang pemotongan ternak betina produktif di beberapa daerah, kenyataannya praktik ini masih berlangsung. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari pemerintah terkait kepada para peternak mengenai pentingnya menjaga ternak betina produktif.

ASO dapat berperan penting dalam menjembatani gap kebijakan tersebut dengan menyediakan layanan administrasi dan manajemen yang diperlukan untuk implementasi peraturan. Dengan dukungan ASO, pemerintah dan lembaga terkait dapat memastikan bahwa kebijakan pelarangan pemotongan ternak betina produktif dijalankan dengan lebih efektif. ASO dapat membantu dalam proses sosialisasi kebijakan kepada peternak, menyediakan pelatihan dan dukungan teknis, serta memonitor pelaksanaan regulasi. Ini akan memperkuat pelaksanaan kebijakan dan membantu peternak dalam memahami serta mematuhi peraturan yang ada.

Namun, di sisi lain, banyak peternak yang lebih memilih untuk menjual atau memotong ternak betina produktif karena alasan ekonomi, seperti kebutuhan finansial jangka pendek atau harga jual yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa selain dukungan dari ASO, kebijakan yang ada belum sepenuhnya memberikan insentif yang cukup bagi peternak untuk mempertahankan ternak betina produktif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tambahan yang dapat meringankan beban ekonomi peternak, sehingga mereka lebih terdorong untuk menjaga ternak betina produktif.

Kebijakan yang ada tidak cukup mendukung peternak dengan akses terhadap teknologi atau pendidikan yang dapat membantu meningkatkan produksi ternak tanpa harus mengorbankan ternak betina produktif. Misalnya, teknologi inseminasi buatan atau transfer embrio yang dapat meningkatkan produktivitas ternak tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Di Kabupaten Lebak, Banten, praktik pemotongan ternak betina produktif seperti sapi, kerbau, domba, dan kambing masih terjadi, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mengendalikannya. Data menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara ketersediaan dan permintaan daging sapi potong di wilayah ini. Misalnya, permintaan daging sapi potong mencapai 78.252 ton sementara ketersediaan hanya sekitar 3.042 ton, sehingga mendorong praktik pemotongan hewan betina produktif untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Kebijakan pelarangan pemotongan ternak betina produktif di Kabupaten Lebak, Banten, memiliki berbagai dampak yang signifikan, baik secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun terhadap ketahanan pangan. Dari segi ekonomi, kebijakan ini berpotensi mengurangi pasokan daging dalam jangka pendek, yang dapat menyebabkan kenaikan harga akibat kelangkaan pasokan. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat membantu mempertahankan populasi ternak produktif yang berkelanjutan, sehingga stabilitas harga daging di pasar dapat tercapai. Peternak juga mungkin menghadapi peningkatan biaya produksi karena harus mempertahankan ternak betina produktif lebih lama atau memanfaatkan teknologi reproduksi untuk meningkatkan produktivitas.

Dari aspek sosial, kebijakan ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku peternak untuk lebih fokus pada keberlanjutan usaha mereka. Peternak perlu diberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai untuk memahami manfaat jangka panjang dari kebijakan ini serta bagaimana mengoptimalkan produksi tanpa mengorbankan ternak betina produktif. Dampak lingkungan dari kebijakan ini juga sangat positif, terutama dalam hal konservasi populasi

ternak betina produktif, yang penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem peternakan dan mencegah degradasi genetik. Selain itu, pengurangan pemotongan ternak betina produktif memungkinkan lebih banyak ternak digunakan untuk reproduksi, sehingga mengurangi tekanan pada sumber daya alam yang digunakan untuk memelihara ternak baru.

Dalam konteks ketahanan pangan, kebijakan ini dapat membantu menjaga populasi ternak yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daging jangka panjang, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional. Kesimpulannya, kebijakan pelarangan pemotongan ternak betina produktif ini diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sektor peternakan dan ketahanan pangan. Namun, untuk memastikan keberhasilan implementasinya, kebijakan ini perlu diiringi dengan penegakan hukum yang ketat, sosialisasi yang efektif, serta dukungan teknologi dan pendidikan bagi peternak. Dengan demikian, dampak negatif jangka pendek, seperti kekurangan pasokan daging dan peningkatan harga, dapat diminimalisir, sementara dampak positif jangka panjang dalam hal ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan dapat tercapai.

Dari pemaparan yang diuraikan, maka peneliti hendak melaksanakan mengkaji fenomena ini dalam tesis dengan judul “***Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif Di Kabupaten Lebak Banten***”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi beberapa masalah-masalah:

1. Implementasi klausul yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 UU No. 41 Tahun 2014 belum berjalan dengan baik dan efektif, salah satu alasan utama ketidak efektifan tersebut adalah tidak adanya regulasi pendukung yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pasal tersebut.

2. Kekurangan dalam penerapan Pasal 18 ayat 4 UU No. 41 Tahun 2014 berdampak pada penegakan sanksi pidana untuk pelanggaran pemotongan ternak betina yang tidak terlaksana secara maksimal.
3. Jika praktik pemotongan ternak betina produktif terus berlanjut tanpa adanya upaya konservasi, populasi ternak unggul dikhawatirkan akan menyusut di masa mendatang.
4. Pemotongan ternak betina produktif dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara produksi dan kebutuhan di pasar, sehingga mengganggu kelancaran distribusi pasokan produk hewani.
5. Ketidakefektifan sosialisasi kebijakan pelarangan pemotongan betina produktif disinyalir disebabkan oleh ketidakefektifan kinerja pihak terkait dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut.
6. Upaya sosialisasi mengenai larangan pemotongan ternak betina produktif oleh instansi terkait belum dilakukan secara rutin, akibatnya praktik tersebut masih kerap terjadi.
7. Tingkat permintaan pasar yang tinggi namun ketersediaan daging yang rendah menyebabkan peningkatan pemotongan ternak betina produktif.
8. Selain tidak optimalnya sosialisasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif, sanksi terhadap pelaku pemotongan hewan betina produktif juga belum diketahui secara menyeluruh oleh pelaku usaha hewan ternak.
9. Adanya hambatan dan kendala yang disinyalir menjadi faktor penyebab kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif tidak terlaksana dengan baik.
10. Diperlukan solusi untuk menyelesaikan hambatan serta kendala yang timbul di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif beserta sanksinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan uraian terkait permasalahan yang dapat diidentifikasi, maka berikut masalah yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apakah ada pengaruhnya implementasi kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten?
2. Mengapa implementasi kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten belum terlaksana dengan baik?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan agar implementasi kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten dapat berjalan dengan optimal?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh implementasi kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten.
2. Menganalisa terkait faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten belum terlaksana dengan baik.
3. Menentukan strategi agar implementasi kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak Banten dapat berjalan dengan optimal.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian yang dilaksanakan ini dapat memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis, yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**
 Penelitian ini bertujuan memperkaya pengetahuan dan keterampilan pembaca, serta menjadi referensi tambahan dalam lingkup ilmiah. Dalam konteks kebijakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 4 tentang Larangan Pemotongan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak, Banten, penelitian ini diharapkan menawarkan wawasan baru

berdasarkan data empiris terkait pelaksanaan kebijakan publik di sektor peternakan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Banten untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 4 tentang Larangan Pemotongan Ternak Betina Produktif, agar kebijakan tersebut lebih mudah dimengerti dan diterapkan oleh warga setempat.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara, serta melalui pendekatan statistik dan deskriptif dengan pendekatan *mixed method*, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pelarangan Pemotongan Hewan Ternak Betina Produktif di Kabupaten Lebak, Banten" adalah sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan larangan pemotongan ternak betina produktif di Kabupaten Lebak, Banten, belum berjalan optimal karena memerlukan perencanaan dan standar yang lebih terukur dalam bentuk program jangka pendek, menengah, dan panjang. Analisis menunjukkan bahwa kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya berkualitas, karakteristik agen pelaksana yang bertanggung jawab, dan komunikasi yang baik antarorganisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Selain itu, peran serta masyarakat, terutama peternak, pedagang, dan pengguna RPH, menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan implementasi kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan penuh, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat melalui aturan yang jelas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta koordinasi dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan.
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan betina produktif di Kabupaten Lebak meliputi kebijakan yang jelas, relevan, serta didukung oleh otoritas terkait yang menyediakan sumber daya dan dana yang cukup. Ketersediaan sumber daya manusia dan non-manusia seperti dana, personel, serta infrastruktur, juga mendukung efektivitas kebijakan. Komunikasi yang baik dan kolaborasi antarorganisasi mempermudah koordinasi, sedangkan lingkungan

ekonomi yang stabil, dukungan sosial masyarakat, dan situasi politik yang kondusif ikut memperkuat implementasi kebijakan ini. Namun, terdapat sejumlah faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti rendahnya motivasi ekonomi peternak, keterbatasan sumber daya teknis, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dan peternak kecil. Kebutuhan ekonomi mendesak mendorong peternak untuk menjual hewan betina produktif, sementara rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan keterbatasan akses ke Rumah Potong Hewan (RPH) juga menjadi kendala. Selain itu, keterbatasan anggaran serta koordinasi yang tidak optimal turut menghambat pelaksanaan kebijakan.

3. Berdasarkan analisis strategi, prioritas utama untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi standar kebijakan adalah dengan memperkuat regulasi kebijakan, diikuti strategi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan fasilitas. Strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini mencakup penguatan regulasi kebijakan melalui peraturan daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, serta memperluas sosialisasi kebijakan kepada peternak dan masyarakat. Pemerintah juga berusaha menyediakan solusi finansial bagi peternak, seperti subsidi atau kompensasi, untuk mencegah mereka menjual hewan betina produktif. Pendekatan yang lebih intensif melalui media sosial, pelatihan, dan evaluasi berkala diharapkan dapat mendukung keberhasilan kebijakan secara berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi akademisi, pemerintah serta masyarakat terkait implementasi kebijakan pelarangan pemotongan hewan ternak betina produktif yaitu:

1. Penelitian ini bisa menjadi bahan masukan penting untuk Dinas Peternakan dalam mengkaji ulang dan meningkatkan cara kerja kebijakan mengenai larangan menyembelih hewan ternak betina produktif di Kabupaten Lebak, Banten. Dengan saran yang konstruktif dari penelitian ini, diharapkan kebijakan yang sudah ada bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya.
2. Bagi komunitas di Kabupaten Lebak, Banten, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kepentingan dari kebijakan larangan penyembelihan hewan ternak betina produktif. Hal ini diharapkan membantu masyarakat memahami pentingnya mendukung kebijakan ini.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan Dinas Peternakan dan pemerintah. Untuk mendorong keberhasilan kebijakan pelarangan pemotongan ternak betina produktif, perlu mempertimbangkan pemberian bantuan finansial langsung kepada peternak dalam bentuk subsidi, kompensasi, atau insentif khusus bagi mereka yang mempertahankan ternak betina produktif. Program bantuan ini bisa diatur dalam bentuk subsidi untuk pakan atau vaksin, pemberian modal tambahan, atau akses kredit dengan bunga rendah. Bantuan finansial ini akan membantu peternak menutupi kebutuhan ekonomi mendesak dan mengurangi insentif untuk menjual ternak betina produktif.
4. Untuk penelitian kedepannya, hasil dari penelitian ini berharap bisa memberikan sumbangan pengetahuan baru mengenai penerapan kebijakan berdasarkan UU No. 41 Tahun 2014 Pasal 18 Ayat 4 tentang larangan menyembelih ternak betina produktif. Penelitian ini juga bisa menjadi dasar teori untuk penelitian lain yang meneliti pengaruh anggaran terhadap kelanjutan penyembelihan hewan ternak betina produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adebowale, O. O., Ekundayo, O., & Awoseyi, A. A. (2020). Female cattle slaughter and foetal wastage: A case study of the Lafenwa abattoir, Ogun state, Nigeria. *Cogent Food and Agriculture*, 6(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2020.1809308>
- Anggraini, D. A. (2021). Kebijakan pemotongan sapi di RPH (Rumah Potong Hewan) dalam kaitannya dengan prinsip manajemen halal dan HACPP (Hazard Analysis Critical Control Point). *Jurnal Halal Research* 1.
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2021. *Populasi Ternak Ruminansia di Kabupaten Lebak Banten*. Banten: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
- Bennu Nur, R., Pattiselanno, A. E., & Girsang, W. (2019). Perilaku Peternak Dalam Pemotongan Sapi Betina Produktif (Penelitian Kasus Rph Kota Ambon). *Agrilan : Jurnal Agribisnis Kepulauan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.30598/agrilan.v7i1.848>
- Creswell, J.W., 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2023. Data Kepegawaian Disnakeswan Kabupaten Lebak, Banten
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak Tahun 2022 *Jumlah Pemotongan Ternak Ruminansia di Kabupaten Lebak Banten*.
- Ediyanto. (2018a). *Implementasi Sanksi Pidana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Larangan Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Sapi Produktif di Provinsi Jambi*. Jambi. Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- Edwards, G.C., 1980. *Implementing Public Policy. 2nd ed. Politics and Public Policy Series*. Congressional Quarterly Press. ISBN 0871871556, 9780871871558.
- Ekowanti, M.R.L., 2023. *Manajemen Strategi Sektor Publik (MSSP)*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Faza, I. (2022) 'Perancangan platform marketplace untuk ekosistem ternak di Kabupaten Kudus', *Jurnal Peternakan Lokal*, 4(2), pp. 60-70. e-ISSN:

2685-7588. Available at:
[<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/peternakan/article/view/1446>]
(Accessed: 25 Juni 2024).

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.

KBBI. (2021). *Definisi Bunting*. <https://kbbi.web.id/bunting>

Kotler, Philip. 2010. *Manajemen Pemasaran. Edisi tiga belas Bahasa Indonesia. Jilid 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga.

Krova, M., Sogen, J. G., & Luruk, M. Y. (2018). Alternatif Kebijakan Pengendalian Pemotongan Sapi Bali Betina Produktif di Timor Barat. *JITRO*, 5(3), 62–71.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan TA 2023. *Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak*.

Lole, U. R., & Keban, A. (2020). Policies to Increase Calves Production in East Nusa Tenggara as a National Production Center. *Animal Production*, 22(2), 98–104. <https://doi.org/10.20884/1.jap.2020.22.2.11>

Mazmanian, D, H & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Harper Collins.

Narundhana, D., Tawaf, R., & Arief, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemotongan Sapi Impor Di Rumah Potong Hewan (Rph) Pemerintah Kota Bandung (Factors That Affected Slaughter Cattle Import In Slaughter House Bandung City Government). *Jurnal Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran*.

Nielsen, S. S., Sandøe, P., Kjølsted, S. U., & Agerholm, J. S. (2019). Slaughter of Pregnant Cattle in Denmark: Prevalence, Gestational Age, and Reasons. *Animals : an open access journal from MDPI*, 9(7), 392. <https://doi.org/10.3390/ani9070392>

Okorie-Kanu, O. J., Ezenduka, E. V., Okorie-Kanu, C. O., Anyaoha, C. O., Attah, C. A., Ejiofor, T. E., & Onwumere-Idolor, S. O. (2018). Slaughter of pregnant goats for meat at Nsukka slaughterhouse and its economic implications: A public health concern. *Veterinary World*, 11(8), 1139–1144. <https://doi.org/10.14202/vetworld.2018.1139-1144>

- Patriani, P., & Saptaji, I. (2019). *Socialization of the Animal Husbandry and Animal Health Act concerning slaughtering productive female livestock in Tebo Regency*. 2(2), 150–157.
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Berita Negara Republik Indonesia.*, 1–43.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi Dan Kerbau Bunting.
- Priyanti, A., Inounu, I., & Ilham, N. (2018). Prevention of Productive Cows Slaughter through Management of Local State Enterprises. *Indonesian Bulletin of Animal and Veterinary Sciences*, 27(2), 53. <https://doi.org/10.14334/wartazoa.v27i2.1405>
- Priyatno, Dwi. 2014. *Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Samadi, S., Sugito, S., & Saputra, Y. (2022). Evaluating the Implementation of the Local Regulations (Qanun) to Control Productive Female Cattle and Buffaloes in Aceh Besar. *Animal Production*, 24(1), 45–56. <https://doi.org/10.20884/1.jap.2022.24.1.128>
- Santoso, Singgih. (2017). *Menguasai statistik dengan SPSS 23*. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo.
- Sapibagus.com. (2022). Negara Konsumsi Daging Tertinggi Di Dunia. <https://www.sapibagus.com/negara-konsumsi-daging-tertinggi/>
- Saputro, B., Firmansyah, F., & Hoesni, F. (2021). Analisis Kelayakan Usaha Rumah Potong Hewan di Kabupaten Muaro Jambi: Penelitian Kasus RPH Cahaya 9. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 6(1), 103. <https://doi.org/10.33087/jmas.v6i1.234>
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa

- Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.
- Sekaran, U., 2003. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. 4th Edition, John Wiley & Sons, New York.
- Sholikhatin, E. (2018). Bauran Pemasaran Di Tempat Pemotongan Hewan (Tph) *Mitra Utama*. 2(2), 83.
- Skidmore, M. E., Sims, K. M., Rausch, L. L., & Gibbs, H. K. (2022). Sustainable intensification in the Brazilian cattle industry: The role for reduced slaughter age. *Environmental Research Letters*, 17(6). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac6f70>
- Soegiyono. (2020). *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta Bandung.
- Spradley, J. (1980). *Participant Observation*. Rinehart and Winston.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Susanawati, L. D., Wirosodarmo, R., & Nasfhia, S. D. (2021). Analisa Potensi Penerapan Produksi Bersih di Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang. *Jurnal Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, 22.
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*. Thousand Oaks: Sage.
- Teknokrat. (2024). *Membuka efisiensi dan keberlanjutan peran teknologi dalam peternakan sapi*. Fakultas Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. Diakses dari <https://ftik.teknokrat.ac.id/membuka-efisiensi-dan-keberlanjutan-peran-teknologi-dalam-peternakan-sapi/>
- Tolistiawaty, I., Widjaja, J., Isnawati, R., & Lobo, L. T. (2017). Gambaran Rumah Potong Hewan/Tempat Pemotongan Hewan Di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. *Jurnal Vektor Penyakit*, 9(2), 45.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Van Meter, D & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process*. Sage Publications, Inc.

Wahab, A. S. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.

Wijoyo, H., 2021. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri.

Winarno. (2016). *Kebijakan Publik*. CAPS (Center of Academic Publising Service).

Yulianti, D., 2018. *Manajemen Strategi Sektor Publik*. Bandarlampung: Pusaka Media.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A